

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul *Unemployment Rate, Government Spending, Gross Regional Domestic Product and Poverty Reduction in Indonesia: A Pooled Data Regression Analysis for Provinces in Indonesia* yang dilakukan oleh Nur Feriyanto (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, dan produk domestik regional bruto untuk variabel independen dan kemiskinan untuk variabel dependen.

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah belum menciptakan pengurangan kemiskinan di seluruh Provinsi di Indonesia. Alokasi anggaran pemerintah untuk pengurangan kemiskinan meningkat setiap tahun, namun demikian, peningkatan tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Variabel pengangguran terbuka tidak mempengaruhi secara signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak orang memilih untuk menjadi pengangguran (pengangguran sukarela) karena ketidakcocokan latar belakang pendidikan mereka dengan pekerjaan yang

tersedia atau dengan tingkat gaji. Variabel PDRB mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi di Indonesia.

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Diah Retnowati dan Harsuti (2014) bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan dan tidak meratanya hal tersebut di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berbentuk data panel, yaitu gabungan dari *time series* selama 5 (lima) tahun dari tahun 2009 sampai 2014 dan data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel dependen tingkat kemiskinan dan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti ketika pengangguran meningkat maka akan diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan hasil yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya jika pertumbuhan ekonomi regional meningkat maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inflasi signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Data ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Dari ke-3 (tiga) variabel independen signifikan atas variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekingsih (2013) mengenai Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2007 hingga 2010. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan data panel yang mendapatkan 140 observasi dari tahun 2007-2010 dan 35 kabupaten/kota. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sebagai variabel independen. Peneliti menggunakan analisis regresi data panel dan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Dari penelitian ini, didapatkan hasil bahwa variabel kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah signifikan secara statistik dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara statistik. Tapi untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hadi Sasana (2012) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Peneliti menggunakan data panel dan mendapatkan 105 observasi dari data gabungan *cross section* dan *time series* 35 kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2006-2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel dependen dan belanja pemerintah daerah, pendapatan perkapita sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian

ini yaitu variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), yang berarti setiap peningkatan belanja Pemda akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada wilayah yang bersangkutan.

Berbeda dengan variabel belanja pemerintah daerah, variabel pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita masyarakat di Provinsi Jawa Tengah belum mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut peneliti data ini dikarenakan kecilnya nominal rata-rata pendapatan yang ada pada tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ni Ketut Eni Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi (2016), melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif kemudian menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian ini yaitu inflasi tidak berpengaruh pada pengangguran Provinsi Bali. Tingkat pendidikan dan investasi berpengaruh meningkatkan pengangguran di Provinsi Bali. Inflasi dan investasi berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, karena variabel tersebut adalah dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja. Sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, karena pengangguran terjadi bukan dari pendapatan rendah akan tetapi banyak pengangguran yang merasa tidak sesuai dengan jenis pekerjaan

yang tersedia, maka pengangguran yang ada hanya bersifat sementara karena menunggu jenis pekerjaan yang cocok bagi mereka.

Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Investasi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Apabila tingkat inflasi tinggi maka angka kemiskinan juga akan melambung tinggi, sebaliknya jika tingkat inflasi rendah maka angka kemiskinan juga akan rendah karena kestabilan harga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Jika dikaitkan dengan pengangguran, sesuai hukum permintaan bahwa apabila permintaan suatu barang meningkat, maka harga barang tersebut akan mengalami kenaikan dikarenakan terbatasnya ketersediaan barang.

Dalam beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan-perbedaan seperti pada variabel penelitian, studi kasus, tahun penelitian dibuat dan wilayah yang dijadikan bahan penelitian. Beberapa penelitian tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Kajian Pustaka**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Variable</b>	<b>Jenis Analisis</b>	<b>Hasil</b>
Nur Feriyanto (2017)	<i>Unemployment Rate, Government Spending, Gross Regional Domestic Product and Poverty Reduction in Indonesia: A Pooled Data Regression Analysis for Provinces in Indonesia</i> (Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Regresi Data yang Terpadu untuk Provinsi di Indonesia)	Dependen : Tingkat Kemiskinan (Y)  Independen : Pengangguran terbuka (X1), produk domestik regional bruto (X2), pengeluaran pemerintah (X3)	Regresi data panel	Tingkat Pengangguran Terbuka tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia. Pengeluaran pemerintah tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia.
Diah Retnowati	Pengaruh Pengangguran	Dependen : Tingkat	Regresi data panel	Pengangguran mempunyai

dan Harsuti (2014)	Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah	kemiskinan (Y)  Independen : Pengangguran (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), inflasi (X3)		pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Inflasi mempunyai hubungan positif antara tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekingsih (2013)	Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah	Dependen : Tingkat Kemiskinan (Y)  Independen : Kesehatan (X1), pendidikan (X2), pengeluaran pemerintah (X3), pertumbuhan ekonomi	Regresi data panel dengan menggunakan pendekatan <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	Variabel kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat

		(X4), pengangguran (X5)		<p>kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak terjadi signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.</p>
Hadi Sasana (2012)	Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks	<p>Dependen : Indeks pembangunan manusia (Y)</p> <p>Independen : Belanja</p>	Regresi data panel	Belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap



	Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)	pemerintah daerah (X1), pendapatan perkapita (X2)		indeks pembangunan manusia (IPM). Pendapatan perkapita masyarakat tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM)
Ni Ketut Eni Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi (2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Dependen : Tingkat kemiskinan (Y)  Independen : Inflasi (X1), tingkat pendidikan (X2), investasi (X3), pengangguran (X4)	Analisis jalur ( <i>path analysis</i> )	Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap pengangguran di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap pengangguran di Provinsi Bali. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di

				Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Pengangguran tidak berpengaruh signifikan secara statistic terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi bali
Fitri Amalia (2017)	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010	Dependen : Jumlah penduduk miskin (Y)  Independen : Pendidikan (X1), Pengangguran (X2), Inflasi (X3)	Model Estimasi Regresi Berganda ( <i>Pooled Least Square</i> )	Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap

				kemiskinan. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
Noor Zuhdiyati dan David Kaluge (2018)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir	Dependen : Kemiskinan  Independen : Pertumbuhan ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3)	Regresi data panel dengan menggunakan pendekatan <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Yarlina Yacoub (2012)	Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan	Dependen : Tingkat kemiskinan (Y)  Independen : Tingkat pengangguran (X)	<i>Deskriptif</i> dan <i>Eksplanatory</i>	Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan

	Barat			Barat negative dan signifikan secara statistik.
Zulhanafi dkk (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas dan Tingkat Pengangguran	Dependen : Produktivitas, tingkat pengangguran  Independen : Pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah, upah, inflasi	Estimasi persamaan simultan	Pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas di Indonesia. Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah dan upah mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia secara signifikan. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia

Pembaharuan yang dilakukan oleh peneliti meliputi tempat penelitian dan tahun penelitian yang lebih baru yaitu dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sampai 2017. Perbedaan lainnya lagi adalah penelitian ini menggunakan variabel berupa inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto sebagai variabel independen dan variabel kemiskinan

sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan analisis data panel (*pooled data*).

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan setiap manusia. Selain itu, kemiskinan juga telah menjadi masalah global karena dihadapi banyak negara. Sebagai sebuah masalah mendasar, kemiskinan dapat juga disebut sebagai problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, hal ini bertujuan agar kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran (Yarlina Yacoub, 2012).

Kemiskinan adalah salah satu masalah umum yang paling banyak dihadapi oleh Negara-negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, juga menghadapi kemiskinan yang berdampak pada proses pembangunan ekonomi nasional. Meskipun telah dibuat banyak kebijakan yang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan menanggulangi kemiskinan, akan tetapi kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit untuk diatasi hingga saat ini (Nur Feriyanto, 2017).

Tolok ukur untuk kemiskinan di suatu daerah adalah dengan menggunakan insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun begitu, kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan saja, masih banyak dimensi lain selain itu (Retnowati dan Harsuti 2014).

Konsep Garis Kemiskinan menurut BPS :

1. Garis Kemiskinan (GK) dapat diartikan juga dengan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah GK dikategorikan sebagai masyarakat miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dapat dilihat dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Hal tersebut diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

### **2.2.2 Inflasi**

Di dalam sebuah sistem perekonomian, terjadinya kenaikan harga barang disebut dengan inflasi. Angka kenaikan harga barang ini tentunya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Begitupun jika dilihat dari periodenya, tingkat inflasi yang terjadi sudah pasti berbeda. Fenomena inflasi dapat terjadi secara terus menerus, meski begitu hal ini tidak berarti bahwa persentase kenaikan

harga barang dari periode ke periode adalah sama. Sadono Sukirno (2006: 354) membedakan inflasi menjadi dua fenomena yang berbeda dilihat dari berbagai macam faktor yang memicu terjadinya fenomena ini di suatu wilayah. Dua jenis inflasi yang dimaksud adalah:

#### 1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi jenis ini dipicu oleh tingkat perekonomian yang mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat. Sebagai akibat dari hal tersebut, permintaan masyarakat akan semakin tinggi sehingga perusahaan-perusahaan akan beroperasi pada kapasitas yang maksimal. Adanya kelebihan permintaan lambat laun akan memicu terjadinya kenaikan harga barang.

#### 2. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi Desakan Biaya adalah jenis inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Secara sederhana fenomena ini dapat dijelaskan sebagai proses yang diawali dengan kenaikan biaya produksi dan kemudian mendorong terjadinya peningkatan harga. Hal ini berkaitan secara langsung dengan kenaikan harga serta penurunan tingkat produksi. Lebih jauh, melemahnya angka produksi berpotensi menimbulkan fenomena yang disebut resesi perekonomian.

### 2.2.3 Hubungan Inflasi Terhadap Kemiskinan

Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflationary gap). Inflasi mendeskripsikan ketidakseimbangan jumlah uang beredar dengan volume barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan demikian inflasi akan ditandai dengan kenaikan harga sebagian besar barang yang terjadi. Pemicu inflasi apakah dari sisi permintaan atau biaya sangat dipengaruhi oleh jenis krisis ekonomi yang menimpa negara.

Apabila suatu negara dilanda krisis produksi maka turunnya volume produksi tidak dapat dimbangi oleh permintaan sehingga berpeluang naiknya harga produk tersebut. Fase tersebut akan mendorong naiknya harga-harga barang lain yang berkaitan yang akhirnya mendorong naiknya inflasi. Keadaan tersebut akan menurunkan daya beli sektor rumah tangga yang berpenghasilan tetap dan rendah yang akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan.

Inflasi juga memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan bantuan dari pemerintah yang mana pemerintah memberi bantuan berupa bahan makan pokok seperti sembako kepada masyarakat dan hal tersebut dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dan hidup di atas *poverty line*. *Poverty line* dapat diartikan



juga dengan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah *poverty line* dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di atas *poverty line* bukan termasuk masyarakat miskin.

#### 2.2.4 Pengangguran

Pengangguran dapat diartikan sebagai suatu kondisi saat terdapat individu yang masuk kedalam golongan angkatan kerja dan menginginkan pekerjaan akan tetapi belum memperoleh kesempatan untuk bekerja (Sukirno, 1994:294). Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan adanya ketimpangan yang berakibat banyaknya angkatan kerja yang menganggur.

Pengangguran tersebut dapat dibedakan berdasarkan (Nur Feriyanto, 2014:159):

1. Kemauannya

- a) Pengangguran terpaksa yaitu seseorang atau kelompok orang yang tidak mendapat pekerjaan, meskipun golongan ini bersedia menerima pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih rendah dari upah yang semestinya.

- b) Pengangguran sukarela yaitu orang atau kelompok orang yang memilih untuk menganggur daripada menerima upah yang rendah dari pada yang seharusnya.

## 2. Faktor Penyebabnya

- a) Pengangguran konjungtural yaitu pengangguran yang disebabkan turunnya kegiatan ekonomi.
- b) Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan perubahan struktural ekonomi suatu negara atau daerah.
- c) Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dipengaruhi oleh kondisi musim. Baik oleh perubahan iklim (cuaca) atau kebiasaan masyarakat.
- d) Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang terjadi oleh karena perubahan teknologi produksi.
- e) Pengangguran wanita yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat suatu daerah atau negara untuk melarang kaum wanita untuk bekerja.
- f) Pengangguran geografis yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya isolasi geografis suatu daerah terhadap kegiatan ekonomi.
- g) Pengangguran budaya yaitu pengangguran yang dikarenakan budaya suatu masyarakat yang masih rendah sehingga mereka mau untuk berpartisipasi dalam pembangunan manusia.

### 2.2.5 Hubungan Pengangguran Terhadap Kemsikinan

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, Jumlah angkatan kerja yang melebihi kapasitas akan menyebabkan pengangguran dan angkatan kerja yang memfokuskan pada perubahan individu hal ini

mengakibatkan tingkat pemutusan hubungan kerja dari tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya setiap bulannya menunjukkan tingkat perolehan pekerjaan, bagian dalam pengangguran yang mendapatkan pekerjaan setiap bulannya (Mankiw, 2007).

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Pengangguran dapat memberikan efek buruk berupa turunnya jumlah pendapatan masyarakat yang lebih jauh akan berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran seseorang. Orang yang menganggur tingkat kesejahteraannya akan turun yang kemudian akan membawa orang tersebut dalam kemiskinan.

#### **2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi**

Pendapatan nasional dijelaskan sebagai besarnya angka produksi barang maupun jasa di dalam system perekonomian selama periode tertentu. Pendapatan nasional juga dapat menjelaskan kenaikan persentase kegiatan ekonomi pada satu tahun. Produk domestik regional bruto (PDRB) sering juga dijadikan acuan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alamnya. Itulah mengapa besaran PDRB pada tiap-tiap daerah sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi dari suatu daerah (BPS: 2016).

Ginting dan Rasbin (2010) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah gambaran mengenai sejauh mana aktivitas perekonomian efektif dalam

memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini diukur melalui indikator yang disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Perbandingan antara PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB pada tahun sebelumnya, dapat menunjukkan berapa tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sehingga dapat dihasilkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB, yaitu :

1. Berdasarkan pendekatan  $Y = C + I + G (X - M)$ , pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan pengeluaran dari berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:
  - a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
  - b) Konsumsi pemerintah (G).
  - c) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi).
  - d) Perubahan stok.
  - e) Ekspor netto (X - M).

2. Menurut pendekatan produksi

Pendekatan produksi memungkinkan untuk mengetahui PDRB dengan cara menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah didefinisikan sebagai selisih dari besarnya nilai produksi dan besarnya biaya antara, yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan, 2005).

3. Menurut pendekatan pendapatan

Jika dilihat dari pendekatan pendapatan, PDRB dapat diartikan sebagai total balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah selama periode tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi dalam hal ini meupakan upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal serta keuntungan.

Menurut Badan Pusat Statistika, PDRB dijelaskan sebagai total dari nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam lingkup wilayah tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di wilayah tersebut. PDRB dapat dilihat berdasarkan dua harga. PDRB yang dilihat atas dasar harga berlaku dapat menunjukkan nilai tambah dari barang dan jasa. Harga berlaku dapat dihitung dengan menggunakan harga tiap tahun. Selain itu PDRB juga dapat dilihat atas dasar harga konstan yang dapat memperlihatkan nilai tambah barang dan jasa.

Harga ini dihitung dengan harga pada tahun tertentu sebagai dasar di mana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2010.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, hal tersebut dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah hal tersebut akan sejalan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PDRB dapat memperlihatkan proses meningkatnya output perkapita dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan PDRB dapat digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan berjalan baik atau tidak. Penghitungan pertumbuhan biasanya dilakukan dalam waktu tahunan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian suatu daerah.

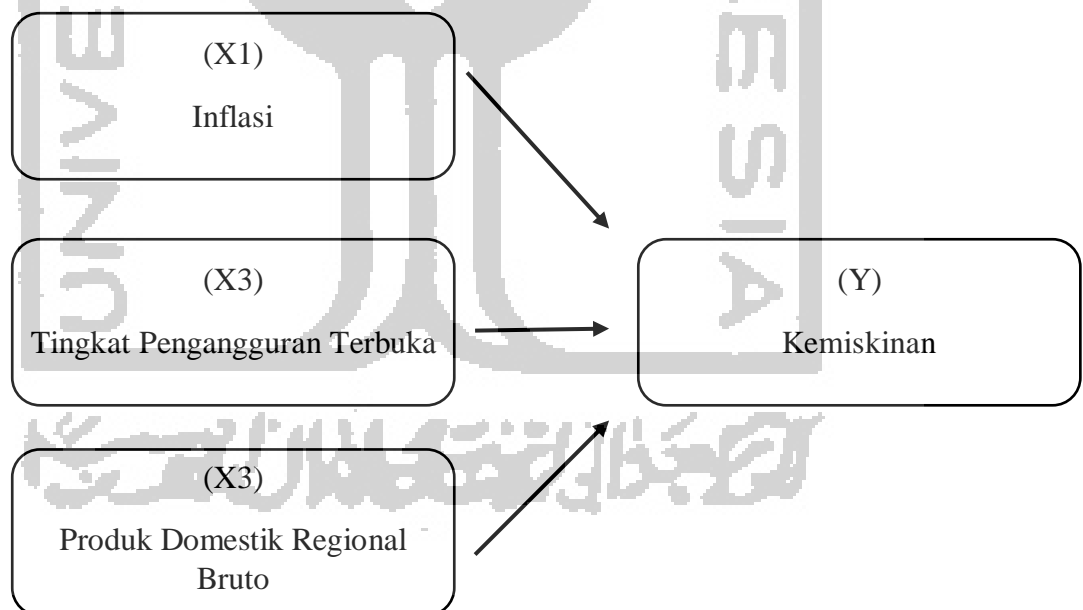
#### **2.2.7 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Menurut kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Menurut Kuznet, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin bersangsur-angsur berkurang. Untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemirikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel yaitu, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut disebut variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) yaitu kemiskinan yang diukur oleh alat analisis regresi agar mendapatkan tingkat signifikannya. Dengan hasil analisis regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikan yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat sementara mengenai adanya suatu hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan teori dan penelitian yang ada maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Variabel inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.